



**PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP)
TAHUN 2022**



**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



=====

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah S.W.T karena dengan rahmat dan kurniannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat diselesaikan, sehingga dapat memenuhi amanat peraturan perundang-undangan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kewenangan Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan dan bagian dari jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, perlu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kewenangan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dalam bentuk laporan yang menggambarkan capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh anggota tim yang terlibat dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh maupun pihak-pihak lainnya yang ikut memberikan kontribusi sehingga penyusunan LKjIP ini dapat diselesaikan dengan baik.

Payakumbuh, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PAYAKUMBUH**

JUNAI, S.T

NIP. 19660131 199803 1 003



=====

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Dinas	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Isu Strategis	4
E. Landasan Hukum	4
F. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis	7
B. Indikator Kinerja Utama	10
C. Perjanjian Kinerja 2022.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	15
B. Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	17
C. Akuntabilitas Keuangan	53
D. Prestasi dan Penghargaan	55
BAB IV PENUTUP	56



=====

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya



=====

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



=====

B. Gambaran Umum Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh berkerja berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh terdiri dari 25 PNS dan 38 orang Tenaga harian lepas (THL).

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Tipologi C, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, 6 (enam) orang Sub Koordinasi.



=====

D. Isu Strategis

Identifikasi isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Payakumbuh yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah dan kemampuan sumberdaya manusia yang terampil dan profesional dibidang e-Government dan Kehumasan.
2. Belum terintegrasinya sistem informasi dan database Perangkat Daerah (PD) secara menyeluruh.
3. Potensi komunikasi masyarakat belum diberdayakan secara maksimal.
4. Pembiayaan jaringan yang membutuhkan anggaran cukup besar belum sebanding dengan ketersediaan anggaran.

E. Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah



=====

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



=====

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis, dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pencapaian Kinerja, Realisasi Anggaran dan Capaian Prestasi dan Penghargaan.

BAB IV PENUTUP

Meliputi simpulan umum atas capaian kinerja SKPD serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan SKPD untuk meningkatkan kinerjanya.



=====

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni Tahun 2017-2022, berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Penetapan dokumen tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



=====

(RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dengan *Stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh tidak terlepas dari visi Pemerintah Kota Payakumbuh, yaitu :

“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”

Adapun Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah :

“Terwujudnya Kota Payakumbuh dengan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi (TI)”



=====

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022 tersebut diatas dilaksanakan melalui Misi sebagai berikut :

“Meningkatnya Penerapan e-Government Yang Berkelanjutan”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh sebagai berikut :



=====

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya penerapan e-Government di Kota Payakumbuh melalui pemanfaatan TIK dan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya Layanan SPBE	Indeks Layanan SPBE	-	-	-	-	B	B
	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang menyebarkan informasi melalui media	80%	90%	100%	100%	70%	70%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase kepuasan pengguna data statistik	80%	80%	80%	80%	75%	75%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penanganan cyber attack	60%	70%	75%	80%	85%	85%
		Jenis Informasi berklasifikasi Persandian yang diamankan	-	-	-	-	1 Set	1 Set
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB	BB	A	A	A	A

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat



=====

Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Layanan SPBE	Indeks Layanan SPBE	Nilai	Sesuai dengan IKU Kota Payakumbuh	Nilai Indeks Layanan SPBE hasil penilaian menpanrb	Laporan Bid e-Gov
2.	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang menyebarkan informasi melalui media	%	Sesuai dengan urusan kominfo	Jumlah PD yang mempublikasikan pembangunan daerah -----x100% Jumlah seluruh PD	Laporan Bid Kehumasan
3.	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral	Persentase kepuasan pengguna data statistik	%	Sesuai dengan urusan kominfo	Jumlah pengguna data statistik yang puas -----x100% Jumlah seluruh pengguna data statistik	Laporan Bid Kehumasan
4.	Meningkatnya kapasitas system keamanan informasi berklasifikasi	Persentase penanganan cyber attack	%	Sesuai dengan urusan kominfo	Jumlah Kasus Cyber Attack yang ditangani -----x100% Jumlah Kasus Cyber Attack yang ada	Laporan Bid e-Gov
		Jenis Informasi berklasifikasi persandian yang diamankan	set	Sesuai dengan urusan kominfo	Jumlah Dokumen yang di distribusikan melalui email sanapati	Laporan Bid e-Gov
5.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	nilai	Sebagai tolak ukur AKIP Diskominfo	Hasil penilaian oleh inspektorat kota	LHE dari Inspektorat



=====

C. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan SPBE	Indeks Layanan SPBE	2,7
2	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang menyebarkan informasi melalui media	70%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase kepuasan pengguna data statistik	75%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penanganan cyber attack	85%
		Jenis Informasi berklasifikasi Persandian yang diamankan	1 Set
5	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A



=====

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika.



=====

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue



=====

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	Red
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Yellow
4	Kurang	50.00 – 64.99	Orange
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Grey

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama OPD dengan



=====

5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebanyak 5 (lima) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Layanan SPBE	Nilai	2,5	3,02	107%
2	Persentase OPD yang menyebarkan informasi melalui media	%	70%	70%	100%
3	Persentase kepuasan pengguna data statistik	%	75%	75%	100%
4	Persentase penanganan cyber attack	%	85%	85%	100%
	Jenis Informasi berklasifikasi Persandian yang diamankan	Set	1 Set	1 Set	1 Set
5	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A



=====

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada beberapa tabel berikut :

Dari 5 (lima) sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Target Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya Layanan SPBE	1	1	107%	1	-	-	-
2	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	1	-	-	1	100%	-	-
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektor	1	-	-	1	100%	-	-
4	Meningkatnya kapasitas sistem keamanan informasi berklasifikasi	2	-	-	2	100%	-	-
5	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	1	-	-	2	100%	-	-

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



=====

Sasaran 1

Meningkatnya Layanan SPBE

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Layanan SPBE

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		%	Kategori	Target Akhir Renstra (2022)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	Indeks Layanan SPBE	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42	2,42	2,52	3,02	107%	Baik	100%

Sasaran Meningkatnya Layanan SPBE dapat dilihat dari indikator Indeks Layanan SPBE. Capaian kinerja indikator Indeks Layanan SPBE hasil penilaian tahun 2022 meraih angka 3,02 atau dengan predikat Baik sesuai dengan yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Indikator Indeks Layanan SPBE merupakan indikator baru hasil refocusing dan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Penilaian Indeks capaian SPBE dilaksanakan oleh MENPANRB terhadap pemerintahan daerah setiap tahunnya. Penilaian dengan menggunakan skala 0-4.



=====

Tabel 3.5
Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Kemenpan RB, 2021

Data dukung bidang penyelenggaraan e-gov untuk Layanan SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 belum ada dari Kementerian PAN RB, hasil indeks spbe hanya secara keseluruhan, belum di informasikan nilai tiap indikator layanan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh sudah berjalan selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2017 silam. Dalam pengembangan aplikasi yang disusun selalu memperhatikan Master Plan e-Government 2014 - 2020 yang telah diterbitkan, dimana pengembangan aplikasi pemerintahan diarahkan kepada upaya-upaya pengintegrasian. Aplikasi-aplikasi tunggal dieliminasi sehingga pekerjaan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Layanan SPBE didukung oleh Program Aplikasi Informatika dengan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan pengelolaan pusat data pemerintahan daerah, sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi



=====

informasi dan komunikasi pemerintah daerah. Output program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pengelolaan dan pengembangan aplikasi sistem Informasi Pemerintah Kota Payakumbuh dan terlaksananya pengelolaan jaringan fiber optik dan pemasangan jaringan wireless di Payakumbuh dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Layanan SPBE dalam pemerintahan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Peraturan Daerah kota Payakumbuh No.3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2) Dukungan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan kinerja bidang e-Government.
- 3) Dukungan dari pengambil kebijakan tingkat Pemerintah Kota Payakumbuh yang kuat untuk pengembangan TI terintegrasi di Kota Payakumbuh dibuktikan dengan tercantumnya indikator ini dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh pada RPJMD Periode 2017-2022.

Faktor Penghambat

- 1) Kebijakan/aturan/regulasi yang belum sepenuhnya dilakukan secara bersama-sama baik di Pemerintah Pusat / Daerah.
- 2) SDM ASN yang masih belum melek teknologi
- 3) Infrastruktur pendukung



=====

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya Layanan SPBE dalam pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Penambahan SDM berkualifikasi programmer di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.
2. Peningkatan analisis sistem dalam penyusunan aplikasi pemerintahan yang berbasiskan kepada aplikasi yang terintegrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya dalam urusan yang berbeda.
3. Mengupayakan pemakaian database bersama antar aplikasi.
4. Penguatan infrastruktur TI di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh secara umum dan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Layanan Indeks SPBE dalam pemerintahan adalah Program Aplikasi Informatika



=====

Tabel 3.7
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Meningkatnya Layanan SPBE	01.01	Indeks Layanan SPBE	Nilai	2,5	3,02	107	1.	Program Aplikasi Informatika	2.531.344.326	2.477.706.412	97,88
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR							100	TOTAL PER SASARAN	2.531.344.326	2.477.706.412	97,88	
TINGKAT EFEKTIVITAS 101,62%												



=====

Sasaran 2**Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik**

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Satuan	Tahun 2022		%	Kategori	Target Akhir Renstra (2022)	%
								Target	Realisasi				
1	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	87,08 %	100 %	100 %	100%	100%	%	100 %	100 %	100	Sangat Baik	100%	100

Sasaran meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik tentang pembangunan daerah dapat dilihat dari indikator persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan Informasi melalui media. Capaian kinerja nyata indikator persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi melalui media adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam arti, bahwa terdapat 31 Perangkat Daerah yang telah mempublikasikan informasi pembangunan baik melalui PPID maupun dalam pemberitaan atas kerjasama dengan media dari 31 Perangkat Daerah telah terpenuhi sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai dengan target yang diperjanjikan.

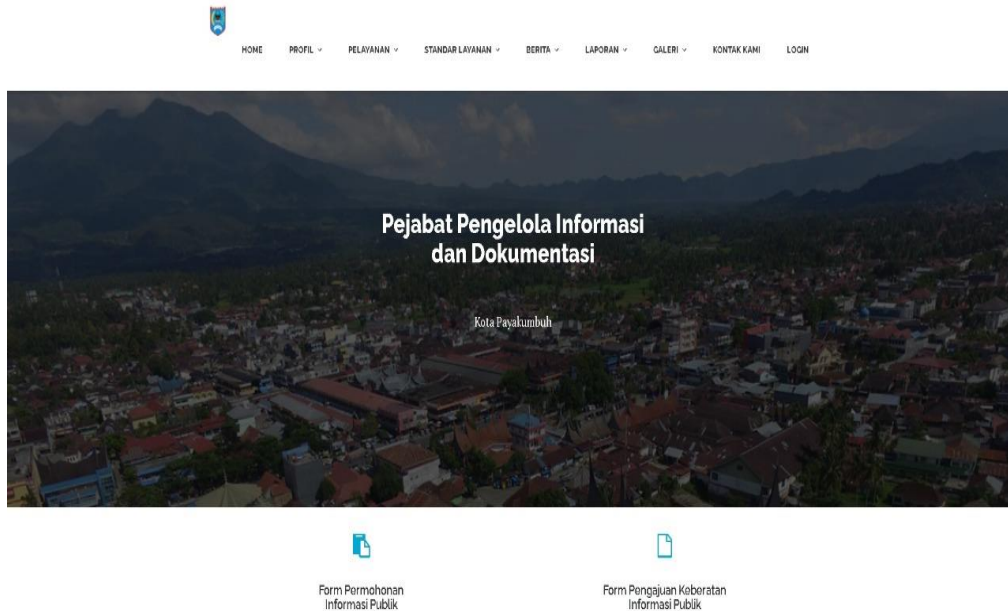
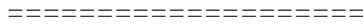
Cara Pengukuran atas capaian indikator persentase Perangkat Daerah yang mempublikasikan informasi pembangunan ini dilakukan melalui 2 (dua)



=====

aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2017 lalu, dimana aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk dapat mempublikasikan informasi kegiatan pembangunan kepada publik, sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengharuskan setiap badan publik dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara transparan.

Aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut meliputi aplikasi Siwarta dan pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui perangkat PPID, baik PPID Utama maupun PPID Pembantu yang bisa diakses terbuka secara umum melalui website <http://ppid.payakumbuhkota.go.id>, aplikasi ini melayani kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dan dokumen dari kegiatan masing-masing perangkat daerah. Pada aplikasi PPID, masing-masing perangkat daerah diharuskan untuk dapat menyampaikan dokumen-dokumen pembangunan yang meliputi Renstra, Renja, Laporan Keuangan, SOP, Peraturan yang terbit dalam kurun tahun tertentu, Notulensi Rapat, bahan publikasi pada masyarakat sesuai dengan kewenangannya, dan seterusnya. Dokumen tersebut selanjutnya di upload untuk dapat disimpan pada aplikasi PPID dan seterusnya masyarakat/publik dapat mengakses dokumen tersebut sesuai dengan level akses dokumen yang diperbolehkan melalui halaman tersendiri. Untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut, pengguna/masyarakat harus melakukan registrasi terlebih dahulu secara online/offline untuk mendapatkan hak akses masuk (username dan password).



Gambar 3.1 Tampilan Aplikasi PPID, Tahun 2022

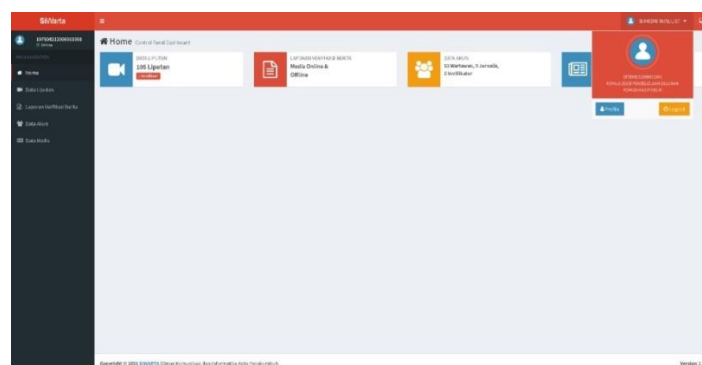
Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk diupload dalam aplikasi dan bisa diakses publik dikatakan sebagai Perangkat Daerah yang telah memiliki keterbukaan informasi pembangunan pada publik. Pengelolaan keterbukaan ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Sekretariat PPID Utama di Kota Payakumbuh.

Selanjutnya aplikasi sistem pemberitaan daerah melalui SIWARTA pada alamat <http://siwarta.payakumbuhkota.go.id> dimana aplikasi ini menjadi media bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk memberitakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tiap Perangkat Daerah tersebut. Pemberitaan atas kegiatan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah pada aplikasi SIWARTA akan dapat diakses secara langsung oleh Para Pewarta



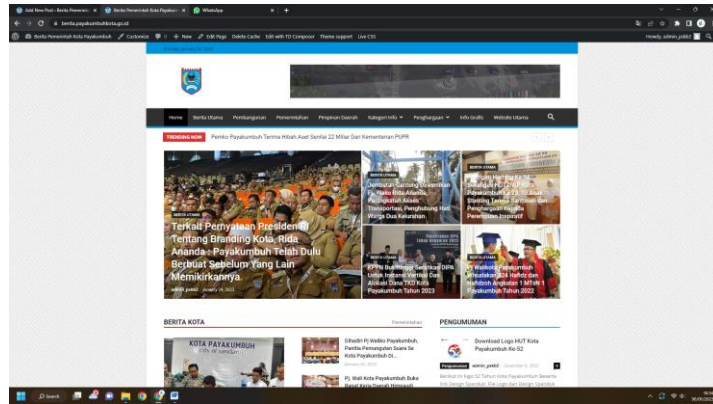
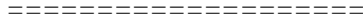
=====

(Wartawan) yang bermitra dengan Pemerintah Kota Payakumbuh, selanjutnya para Wartawan tersebut dapat mengambil pemberitaan tersebut untuk dipublikasikan pada media yang dikelolanya. Cara ini menjadi alternatif kedua dari upaya publikasi pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, publikasi yang dilakukan dengan cara ini lebih aktif dibandingkan melalui PPID diatas. Untuk menjaga kelangsungan pemberitaan dari SIWARTA, bidang Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyiapkan aplikasi kliping arsip pemberitaan dari media-media yang bermitra dengan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui alamat website <http://kliping.payakumbuhkota.go.id>, aplikasi ini merupakan aplikasi pengarsipan berita dari seluruh media-media lokal yang ada untuk bisa tetap diakses dalam waktu tertentu. Kliping yang telah disiapkan pada kliping media cetak harian, media cetak mingguan dan media online yang bermitra dengan Pemerintah Kota Payakumbuh.



Gambar 3.2 Tampilan Aplikasi Siwarta, Tahun 2022

Media publikasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemerintahan Kota Payakumbuh berupa relis berita dan foto kegiatan akan di publikasikan melalui alamat <http://berita.payakumbuhkota.go.id> dimana aplikasi ini menjadi media bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk kegiatan-kegiatan terkait Pemerintahan Kota Payakumbuh yang dilaksanakan di tiap Perangkat Daerah tersebut di publikasikan.



Gambar 3.3 Tampilan Alamat Berita

Adapun media-media yang bermitra dengan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 terdapat 84 media, mulai dari cetak, Radio, TV dan Online. Seluruh media yang ada menyampaikan kelengkapan dokumen media pada Dinas Komunikasi dan Informatika, mulai dari Izin Usaha, SIUP, TDP, Legalitas perusahaan pers dan data Wartawan yang ditugaskan di Kota Payakumbuh. Data atas media tersebut dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9

Jenis dan Jumlah Media Publik yang Bermitra Tahun 2022

No	Jenis Media Massa	Jenis Media Massa
1.	Media Cetak Harian	7 media
2.	Media Cetak Mingguan	18 media
3.	Media Online	48 media
4.	Radio	5 stasiun
5.	TV	4 stasiun
	JUMLAH	84 media

Sumber : Bidang Humas Diskominfo, 2022



=====

Tahun 2022 adalah tahun Kelima Renstra, capaian Tahun 2022 sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian kinerjanya sudah mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja indikator persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media dari Kepala Bidang Kehumasan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10

Data Perangkat Daerah Yang Mempublikasikan Informasi Pembangunan

No	Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi melalui PPID	Jumlah Berita Publikasi melalui Media
1	Setdako	9 dokumen	101 berita
2	Satpol PP dan Damkar	9 dokumen	98 berita
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7 dokumen	52berita
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9 dokumen	24 berita
5	Dinas Kesehatan	1 dokumen	272 berita
6	Dinas Pendidikan	9 dokumen	85 berita
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8 dokumen	23 berita
8	Dinas Pertanian	10 dokumen	22 Berita
9	Dinas Koperasi dan UKM	9 dokumen	141 berita
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10 dokumen	33 berita
11	Dinas Perpustakaan dan Arsip	9 dokumen	11 berita
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	9 dokumen	42 berita
13	Dinas Ketahanan Pangan	9 dokumen	24 berita
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	5 dokumen	17 berita
15	Dinas Lingkungan Hidup	7 dokumen	51 berita
16	Dinas Perhubungan	4 dokumen	15berita
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7 dokumen	16 berita
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	6 dokumen	34 berita
19	Dinas Sosial	8 dokumen	37 berita
20	Sekretariat DPRD	8 dokumen	40 berita
21	Inspektorat	6 dokumen	6 berita
22	BPBD	8 dokumen	54 berita
23	BKPSDM	9 dokumen	18 berita
24	BAPPEDA	8 dokumen	12 berita
25	Badan Keuangan Daerah	9 dokumen	21 berita
26	Kantor Kesbangpol	9 dokumen	36 berita
27	Kecamatan Payakumbuh Barat	8 dokumen	18 berita
28	Kecamatan Payakumbuh Timur	8 dokumen	24 berita
29	Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	9 dokumen	14 berita
30	Kecamatan Payakumbuh Utara	5 dokumen	20 berita
31	Kecamatan Payakumbuh Selatan	8 dokumen	11 berita
	Jumlah PD terpenuhi kriteria	31 PD	31 PD
	% Capaian dari 31 PD	100 %	100 %
	% Rata-rata PD ter-publikasi		100 %



=====

Sumber : Data Publikasi PPID dan Siwarta, 2022

Dari 31 perangkat daerah tersebut, untuk publikasi informasi publik melalui PPID, sudah terpublikasikan seluruhnya. Dalam persentase, capaian publikasi informasi publik melalui PPID dan publikasi informasi pembangunan melalui penyebaran kegiatan lewat media Perangkat Daerah mencapai 100%, sehingga capaiannya sudah 31 Perangkat Daerah dari 31 yang ada, atau 100%. Kesimpulannya bahwa dari kedua jenis media publikasi pembangunan tersebut capaian dari indikator ini berupa rata-rata capaian atas keduanya, sehingga capaian kinerja indikator ini menjadi 100%.

Capaian kinerja indikator Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media untuk Tahun 2022 sudah mencapai 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sejak tahun 2017 target ini sudah menjadi urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang mana sebelumnya target ini diemban oleh Bagian Humas Sekretariat Pemerintah Kota Payakumbuh.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik didukung oleh program Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Layanan Hubungan Media. Output program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut antara lain terlaksananya peliputan semua kegiatan pemerintah Kota Payakumbuh dan terlaksananya kegiatan peliputan ke semua media elektronik dan media cetak, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik disebabkan faktor pendukung dan



=====

penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Kerjasama yang terjalin dengan bidang e-Government, dimana penyusunan aplikasi Kehumasan dapat diselesaikan di tahun yang sama sehingga dapat langsung diimplementasikan dalam memenuhi target kinerja kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.
2. Hubungan yang baik antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan mitra media melalui Paguyuban Wartawan Luak Limapuluh Kota Payakumbuh yang tergabung pada Balai Wartawan.
3. Dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Payakumbuh dalam menginformasikan kegiatan-kegiatan dan informasi publik yang dapat disebarakan melalui media atau dipublikasikan melalui web PPID.

Faktor Penghambat :

1. Pembiayaan publikasi media dengan pihak ketiga yang cenderung tinggi dan tidak terstandar, sangat bergantung dengan popularitas dari media yang bersangkutan.
2. Tenaga liputan pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum capabel.
3. Kurangnya dukungan OPD tentang Implementasi UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.



=====

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Layanan Informasi dan Komunikasi Publik tentang pembangunan daerah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melengkapi perlengkapan kehumasan sesuai dengan standar.
2. Menyiapkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadi mediator pemberitaan kepada media maupun media publikasi milik Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Diadakannya sosialisasi tentang UU KIP No. 14 Tahun 2008

Adapun program yang mendukung pencapaian Layanan Informasi dan Komunikasi Publik tentang pembangunan daerah adalah program Informasi dan Komunikasi Publik.



=====

Tabel 3.11
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	1.1	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	%	70%	100	100	1 Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.378.609.452	1.239.310.385	89,90
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					100	TOTAL PER SASARAN	1.378.609.452	1.239.310.385	89,90
TINGKAT EFISIENSI 46,39 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 148,09 %											



=====

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Satuan	Tahun 2022		%	Kategori	Target Akhir Renstra (2022)	%
						Target	Realisasi				
1	Persentase kepuasan pengguna data statistik sektoral	87,51	87,52	86,99	%	90%	87,72%	97	Sangat Baik	90%	-

Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral dapat dilihat dari indikator kinerja Persentase Kepuasan Pengguna Data Statistik Sektoral. Capaian kinerja nyata indikator persentase kepuasan pengguna data statistik sektoral tahun 2022 terealisasi sebesar 87,72% dari jumlah 90% yang ditargetkan, hitungan ini berdasarkan survey yang dilakukan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah terhadap Publikasi Statistik Sektoral yang merupakan produk dari Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 12 ayat 2 bahwa salah satu tahapan penyelenggaraan Statistik Sektoral di Instansi adalah dengan cara survei.



=====

Tabel 3.13
Tingkat Kepuasan Pengguna Publikasi Statistik Sektoral 2022
Berdasarkan Kuisioner yang telah dibagikan ke beberapa ASN di lingkungan
Pemko Payakumbuh

Usia Responden	Instansi	Hasil	Persentase
36 Tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika	<i>Sangat Baik</i>	100,00
56 Tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika	<i>Sangat Baik</i>	98,13
54 Tahun	Dinas Pendidikan	<i>Sangat Baik</i>	85,00
40 Tahun	BKPSDM Kota Paakumbuh	<i>Baik</i>	83,75
54 Tahun	Dinas Pendidikan	<i>Baik</i>	83,13
55 Tahun	BKPSDM Kota Paakumbuh	<i>Sangat Baik</i>	91,56
36 Tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika	<i>Baik</i>	78,13
36 Tahun	Inspektorat	<i>Sangat Baik</i>	96,25
35 Tahun	inspektorat	<i>Sangat Baik</i>	85,00
44 Tahun	Kecamatan Payakumbuh Timur	<i>Baik</i>	76,25
			87,72

* *Kuisioner di bagikan melalui Google form*

* *Hasil diperoleh melalui survey berupa kuisioner yang telah dibagikan*

* *Hanya 10 responden yang bersedia mengisi kuisioner tersebut*

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Kategori	Target Akhir Renstra 2022	%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Persentase kepuasan pengguna data statistik	90 %	86,99 %	109	90%	87,72 %	97	Sangat Baik	90%	



=====

Pada tahun 2022 realisasi meningkat sebesar 87,72 atau sekitar 1,73 % dari tahun 2021. Artinya peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan, hal ini dikarenakan responden dari beberapa perangkat daerah tidak mengisi survey yang telah dibagikan melalui Google form, namun hasil capaian yang diperoleh dari 10 responden yang mengisi kuisisioner sangat memuaskan, artinya masih dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2022
Dengan target Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	%	Kategori	Target Akhir Renstra 2022	%
1	Persentase kepuasan pengguna data statistik	90 %	87,72 %	97	Sangat Baik	90%	

Pada tahun 2017 penyusunan rancangan penyelenggaraan survey kepuasan pengguna data statistik sektoral belum bisa dilaksanakan, mengingat bahwa penetapan indikator persentase kepuasan pengguna data statistik sektoral baru disusun sewaktu perumusan perubahan rancangan dokumen SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, termasuk perubahan Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun pada bulan Oktober 2017 lalu, dan ditambah objek yang akan diukur atau dijadikan penilaian juga belum tersedia dari Dinas Kominfo, seperti publikasi statistik kita belum punya produk sendiri, untuk Payakumbuh Dalam Angka dan publikasi BPS lainnya ini merupakan produk yang dihasilkan oleh BPS, sehingga saat itu penilaian belum bisa



=====

dilakukan. Sementara untuk Tahun 2018, Dinas Kominfo mulai berupaya untuk membuat publikasi statistik sektoral yang datanya berasal dari seluruh Perangkat daerah terkait, sehingga dari publikasi inilah survey kepuasan pengguna data statistik baru bisa dilaksanakan hingga tahun sekarang.

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 survey kepuasan atas publikasi statistik sektoral bisa berjalan dengan telah terbitnya publikasi statistik dari Dinas Kominfo. Sasaran objek yang kita jadikan penilaian atas publikasi data statistik adalah ASN dan Perangkat Daerah terkait yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2022
Dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		%	Standar Nasional
		Target	Realisasi		
1	Persentase kepuasan pengguna data statistik	90 %	87,72 %	97%	

Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu (Perangkat Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah (Perangkat Daerah) yang bersangkutan. Sebagaimana hal ini telah tertuang dalam Undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, dimana Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik bertugas sebagai penyelenggara statistik sektoral sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri, atau bersama dengan BPS (Badan Pusat Statistik). Dalam menyelenggarakan statistik sektoral ini, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara survey, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan



=====

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dikatakan bahwa Instansi yang menyelenggarakan urusan statistik disebut sebagai Walidata, artinya instansi tersebut bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskannya. Sementara peran Produsen Data atau Walidata Pendukung diemban oleh Instansi Daerah yang menghasilkan data atau sumber data, dan BAPPEDA sebagai Koordinator Data atau Forum Data. Fungsi-fungsi penyelenggaraan data statistik yang tertuang didalam perpres nomor 39 tersebut tidak bisa terlepas dari BPS sebagai pembina data, karena BPS satu-satunya Instansi yang mengelola urusan statistik yang dapat memberikan rekomendasi atas instansi yang akan melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral ini, seluruh lembaga instansi yang terlibat mesti bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Adanya koordinasi yang baik antara Walidata, Produsen data dan Pembina Data akan dapat menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Disisi lain beberapa faktor yang dapat mewujudkan kegiatan tersebut adalah kondisi kelembagaan dimasing-masing sektor data antara Walidata dengan Produsen Data meski diseragamkan ditambah penguatan dari sumber daya yang ada dan meningkatkan kuantitas serta kualitasnya.

Penyediaan data statistik di Produsen Data (Perangkat Daerah) sangat dibutuhkan dimana kelemahan kita saat ini, banyak yang belum mengerti arti pentingnya sebuah data dalam proses pembangunan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan hingga penyajian data menjadi kendala tersendiri.

Pengelolaan statistik sektoral merupakan indikator terpilih dalam urusan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh. Tahun 2016 urusan statistik ini merupakan urusan yang dikelola di Bidang



=====

Data dan Litbang Bappeda Kota Payakumbuh yang lebih fokus pada ketersediaan data terkait penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Seiring dengan peningkatan kebutuhan pencapaian target sasaran pengembangan statistik dalam pengambilan kebijakan daerah, masalah ketersediaan dan ketepatan waktu akses data statistik sektoral menjadi hal yang penting.

Seperti tahun sebelumnya, capaian kinerja sasaran untuk tahun 2022 didukung oleh program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Output program dan kegiatan tersebut adalah dihasilkannya publikasi statistik atau dokumen statistik, secara tidak langsung Perangkat Daerah ikut aktif berpartisipasi dalam menyelenggarakan statistik sektoral.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Urusan statistik sudah tersedia dan berdiri sendiri pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Payakumbuh walaupun masih pada tataran Eselon IV dengan beban kerja yang sesuai dengan Rencana Kegiatan atau RKA.
2. Dukungan dari pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat, BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.

Faktor penghambat:

1. Belum disepakatinya ruang lingkup statistik sektoral yang akan



=====

disiapkan oleh Perangkat Daerah.

2. Beragamnya tatanan kelembagaan urusan statistik di Instansi Pemerintah, sehingga terjadinya perbedaan tugas dan fungsi kegiatan.
3. Kurangnya SDM yang menangani urusan statistik di Dinas Komunikasi dan informatika jika dilihat dari tugas besar yang akan diemban.
4. Tatanan kelembagaan urusan statistik di Dinas Kominfo yang tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang tertuang di perpres Nomor 39 tahun 2019.
5. Ditingkat Propinsi sendiri, forum satu data masih dalam tahap koordinasi dan konsolidasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan statistik sektoral, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral sesuai metode yang ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Mendorong pemerintah pusat untuk menyeragamkan tatanan kelembagaan urusan statistik di Instansi Pemerintah.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM/tenaga statistik.
4. Menyelenggarakan forum data (FGD) dan bersama BPS atau secara mandiri di Kota Payakumbuh.
5. Menetapkan kebutuhan sajian statistik tiap sektor dalam memenuhi pengambilan kebijakan.
6. Penyediaan sarana maupun prasarana untuk menunjang kegiatan.
7. Dukungan anggaran untuk kegiatan

Adapun program saat ini dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Statistik Sektoral adalah program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



=====

Tabel 3.17
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	1.1	Persentase kepuasan pengguna data statistik	%	90	87,72	97	1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup kab/kota	51.306.090	49.407.000	96,30
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					97	TOTAL PER SASARAN	51.306.090	49.407.000	96,30
TINGKAT EFISIENSI 36,49 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 148,82 %											



=====

Sasaran 4
Meningkatnya Kapasitas Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Kapasitas Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		%	Kategori	Target Akhir Renstra (2022)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Persentase penanganan cyber attack	60%	-	70%	100%	75%	100%	80%	100%	80%	100%	85%	100%	100	Baik	90%
2	Jenis informasi berklasifikasi persediaan yang diamankan									1 Set	100%	1 Set	100%			

Sasaran Meningkatkan Kapasitas Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi dapat dilihat dari indikator persentase penanganan cyber attack.

Definisi attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi. Tindakan ini bisa ditujukan untuk mengganggu secara fisik maupun dari alur logic sistem informasi. Cyber attack merupakan upaya mengganggu informasi yang berfokus pada alur logic sistem informasi.

Pada Tabel di atas terlihat pencapaian realisasi indikator persentase penanganan cyber attack pada tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target



=====

yang telah ditetapkan 80%, ini berarti untuk semua kasus yang terjadi di tahun 2022 dapat ditangani dengan baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk tahun 2022, jenis serangan siber yang diterima tergolong sedikit. Berikut daftar cyber attack yang terjadi selama tahun 2022.

Tabel 3.19

Daftar Cyber Attack yang terjadi di tahun 2022

No.	Jenis cyber attack	Uraian	Ket.
1	Deface	Upaya untuk merubah tampilan web pada website https://rsudadnaanwd.payakumbuhkota.go.id	

Dilihat dari pencapaian pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, hal ini juga telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 85% pada Tahun 2022 dengan realisasinya 100%. Hal ini dikategorikan sangat baik dalam pencapaian indikator persentase penanganan cyber attack yaitu sebesar 100 %.

Selain itu, pencapaian untuk Jenis informasi berklasifikasi persandian yang diamankan yang dikelola juga berhasil di realisasikan dengan persentase 100%. Jenis Informasi ini dikelola melalui layanan email berklasifikasi yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi negara yang dinamakan dengan email SANAPATI. Email sanapati merupakan salah satu layanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mendukung pengamanan informasi di Pemerintah Daerah. Email sanapati memiliki fitur keamanan yang dapat meminimalkan risiko ancaman keamanan informasi melalui email antara lain bersifat close group yang hanya bisa mengirim dan menerima dari dan ke sesama email sanapati, menerapkan koneksi yang aman serta memiliki proteksi terhadap *malware*, *spam*, dan *phishing*.



=====

Tabel 3.20

Daftar Informasi Berklasifikasi yang dikelolal di tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	22
2.	Februari	22
3.	Maret	60
4.	April	28
5.	Mei	36
6.	Juni	48
7.	Juli	45
8.	Agustus	63
9.	September	49
10.	Oktober	22
11.	November	19
12.	Desember	46
Jumlah		460

Capaian kinerja sasaran ini untuk Tahun 2022 didukung oleh program penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Output program dan kegiatan serta sub kegiatan tersebut antara lain terlaksananya monitoring dan evaluasi kemanan informasi serta tersedianya layanan helpdesk di Kota Payakumbuh



=====

Tabel 3.20
Jumlah Pengaduan dan Layanan yang diproses melalui Helpdesk

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan
1	Januari	61
2.	Februari	69
3.	Maret	274
4.	April	186
5.	Mei	52
6.	Juni	64
7.	Juli	103
8.	Agustus	178
9.	September	104
10.	Oktober	97
11.	November	84
12.	Desember	95
	Total	1367

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan indikator persentase penanganan cyber attack dan jenis informasi berklasifikasi persandian yang diamankan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Urusan Persandian sudah tersedia dan berdiri sendiri pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Payakumbuh walaupun masih pada tataran Eselon IV.
2. Dukungan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas



=====

Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melakukan penataan persandian pada tatanan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

3. Adanya tambahan keamanan sistem dari Tenaga Jasa Perorangan (TJP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.
4. Telah digunakannya layanan *Secure Socket Layer* pada website yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan peralatan kerja, seperti anti virus, *Firewall* dan lainnya untuk mendeteksi dan menangani gangguan/serangan cyber.
2. Tenaga persandian (sandiman) yang belum tersedia.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melengkapi perlengkapan persandian sesuai dengan standar.
2. Menyiapkan kapasitas SDM untuk menjadi sandiman yang handal.
3. Meningkatkan Kompetensi SDM keamanan Siber sesuai dengan perkembangan teknologi.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi adalah program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.



Dinas Komunikasi dan Informatika

=====



Tabel 3.21
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	1.	Persentase penanganan kasus cyber attack	%	85%	8	100	1	Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	190.251.282	186.488.899	98,02
		2.	Jenis informasi berklasifikasi persandian yang diamankan	Set	1	1	100					
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					100		TOTAL PER SASARAN	190.251.282	186.488.899	98,02
TINGKAT EFISIENSI 46,39 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 148,09 %												



=====

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 7.679.237.626.-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 7.272.855.969.-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **94,71%**, dari total anggaran belanja langsung yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika kondisi anggarannya adalah SILPA **Rp. 406.381.657.-** hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Misi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Layanan SPBE	2.531.344.326	2.477.706.412	97,88%
2	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	1.378.609.452	1.239.310.385	89,90%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektor	51.306.090	49.407.000	96,30%



=====

4	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	190.251.282	186.488.899	98,02%
5	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.527.726.476	3.319.943.273	94,11 %
	Jumlah	7.679.237.626	7.272.885.969	94,71%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh pada Tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.26
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran I	1	100%	2.477.706.412	97,88
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-		
2	Sesuai Target	1	100%		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B.	Sasaran II	1	100%	1.239.310.385	89,90
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-		
2	Sesuai Target	1	100%		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
C.	Sasaran III	1	100%	49.407.000	96,30
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-		
2	Sesuai Target	1	100%		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
D.	Sasaran IV	2	100%	186.488.899	98,02
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-		
2	Sesuai Target	2	100%		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
E.	Sasaran V	1	100%	3.319.943.273	94,11



=====

1	Melebihi/Melampaui Target	-	-		
2	Sesuai Target	1	100%		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		

D. Prestasi dan Penghargaan

Sampai tahun 2022 prestasi ataupun penghargaan yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Piagam penghargaan dari Telkom Indonesia sebagai Pemerintah Daerah yang telah siap mengimplementasikan Smart City Nusantara.
2. Piagam dari Walikota Payakumbuh untuk penghargaan predikat kepatuhan tinggi terhadap OPD yang pengelolaan aset terbaik.



Gambar. 3.3 piagam yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika



=====

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:



=====

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 7.679.237.626.-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 7.272.855.969.-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **94,71%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh kondisi anggaran dengan SILPA **Rp. 406.381.657.-** hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh telah berjalan secara optimal dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.



=====

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PAYAKUMBUH**



JUNAI, S.T

NIP. 19660131 199803 1 003